

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN



oleh :

**RAFEL JAFLAUN
1110321033**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

RAFEL JAFLAUN
1110321033

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **9 Oktober 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak. CA.	Ketua	1..... 
2.	M. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak. CA	Sekretaris	2..... 
3.	Sukria Natsir, S.E., M.Si., Ak. CA.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Hj Nirwana, S.E., Ak., M.Si.	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Afdal, S.E., M.Sc., Ak., CA.

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

disusun dan diajukan oleh

**RAFEL JAFLAUN
1110321033**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 9 Oktober 2015
Pembimbing



Ahmad Dahlan. S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODA...
Ardi, S.E., M.Sc., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Rafel Jaflaun

NIM : 1110321033

program studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan

Rafel Jaflaun

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan menghaturkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan penuh perjuangan dan harapan yang pasti.

Proposal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Selatan Kota Makassar ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosil Universitas Fajar.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini terutama dengan :

1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pemberi nikmat dan hidayah.
2. Kedua orang tua saya, Daniel Hamdan dan Jenny Jaflaun yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.
3. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA. selaku Rektor Universitas Fajar.
4. Bapak Ahmad Dahlan, SE., M. Si., Ak., CA selaku Pembimbing Akademik yang terus memberikan waktu, kritik dan saran serta mengarahkan penulis sehingga laporan Proposal ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Muh. Afdal, SE., M. Sc., Ak. dan seluruh dosen-dosen Universitas Fajar yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis.

6. Kepada Kak Ilo yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta motivasi dan doanya, saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Kepada Veice Agnesia Pakinde, Ida, Dheandra Gracia Rambiko, Vanny, kak Ice, kak Tasya, Jannette, kak Ninil yang telah memberikan doa dan motivasi yang besar kepada penulis.
8. Teman-teman jurusan Akuntansi S1 angkatan 2011 yang memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan Proposal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan nikmat kepada Bapak, Ibu dan saudara(i). Aamiin...

Akhirul Kalam, penulis memohon maaf jika kata-kata yang kurang berkenan di hati pembaca, dan berharap semoga Laporan Proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalam,

Makassar, 24 Mei 2015

Rafel Jaflaun

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Rafel Jaflaun

Ahmad Dahlan

Sejak tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yakni penelitian yang menggabungkan beberapa variabel-variabel penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa variabel Sikap, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial dan simultan berpengaruh secara signifikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat memperhatikan dan memahami Sikap, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan sanksi pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kata Kunci : Sikap, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Kegunaan Penelitian 5

1.4.1 Kegunaan Teoritis 5

1.4.2 Kegunaan Praktis 5

1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
------------------------------------	---

1.6 Definisi dan Istilah	5
--------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	7
-------------------------------------	---

2.1.1 Perpajakan Secara Umum.....	7
-----------------------------------	---

2.1.2 Pajak Penghasilan Umum	13
------------------------------------	----

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	14
-----------------------------------	----

2.1.4 Ketetapan Hukum dan Sanksi	15
--	----

2.1.5 Kondisi Keuangan.....	16
-----------------------------	----

2.1.6 <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB).....	18
---	----

2.2 Tinjauan Empirik	20
----------------------------	----

2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
-----------------------------	----

2.4 Hipotesis Penelitian	25
--------------------------------	----

2.4.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	25
--	----

2.4.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	25
---	----

2.4.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi	26
---	----

2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	27
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	28
--------------------------------	----

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
--------------------------------------	----

3.3 Populasi dan Sampel	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Pengukuran Variabel.....	30
3.7 Analisis Data.....	33
3.7.1 Statistik Deskriptif	33
3.7.2 Uji Validitas dan Realiabilitas	33
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	34
3.7.4 Pengujian Hipotesis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Instansi Tempat Penelitian	38
4.2 Deskripsi Data	44
4.2.1 Karakteristik Responden	44
4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden.....	47
4.2.3 Uji Validitas dan Reabilitas	53
4.3 Analisis Data.....	58
4.3.1 Uji Asumsi klasik	59
4.3.2 Analisis Regresi Berganda.....	63
4.4 Pembahasan	67
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.2 Tinjauan Empirik	20
4.1 Distribusi Kuesioner	45
4.2 Jenis Kelamin Responden	45
4.3 Tingkat Pendidikan Responden	46
4.4 Umur Responden	47
4.5 interval kelas	49
4.6 Diskripsi Variabel Sikap	49
4.7 Diskripsi Variabel Norma Subjektif	50
4.8 Diskripsi Variabel Kondisi Keuangan	51
4.9 Diskripsi Variabel Sanksi Pajak	52
4.10 Diskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	53
4.11 Uji Validitas Variabel Sikap	54
4.12 Uji Validitas Variabel Norma Subjektif	55
4.13 Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan	55
4.14 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	56
4.15 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.16 Uji Realibilitas	58
4.18 Coefficients (a)	61
4.19 Regresi Linier Berganda	63
4.20 Koefisien Determinasi (R ²)	65
4.21 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	24
4.17 Tabel One-Sample Kolmogorov-Smimov Tes	60
4.1 Scatterplot Dependent Variabel Y	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Koesioner	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Perlu disadari bahwa sampai saat ini pajak tetap memiliki peran yang cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2014 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara.

Sejak tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak meminimalisasi bahkan mengabaikan kewajiban pajak yang merupakan tanggung jawabnya.

Sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang telah melakukan beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap. Sedangkan ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, dan penyempurnaan undang-undang

pajak upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, sistem *self assessment* menuntut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap wajib pajak, norma subjektif, kondisi keuangan, sanksi perpajakan, dan beberapa faktor lainnya.

Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Selatan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Makassar yang memberikan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi (WP) maupun wajib pajak badan. Pada Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Selatan telah terdaftar sebanyak ±127.000 wajib pajak orang pribadi, dari jumlah tersebut diketahui bahwa sebanyak ±100.000 atau sekitar 78,7% wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang aktif / patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan setiap bulannya. Dari pemaparan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat wajib pajak tersebut aktif / patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hardayah (2013) melakukan penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Hasil penelitian tersebut Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan dan kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak badan. Siat dan Toty (2013) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan, Petugas Pajak , Sanksi Hukum, dan Sikap

Rasional Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Arum (2012) meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian eksplanatori, yakni penelitian yang menggabungkan beberapa variabel-variabel penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hardayah (2013) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel kondisi keuangan. Variabel kondisi keuangan dianggap faktor yang penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2012) yang menunjukkan bahwa Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini dalam bidang perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan datang

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak terlebih khusus Kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diketahuinya berbagai faktor tersebut, maka hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan wajib pajaknya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menjelaskan empat variabel yaitu sikap, Norma subjektif, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan yang dijelaskan dalam bentuk pernyataan dalam bentuk kuesioner. Objek dalam penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

1.6. Definisi dan Istilah

Definisi dan istilah dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian

ini. Adapun istilah yang dianggap perlu dijelaskan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap adalah perilaku seseorang terhadap kewajiban membayar pajak menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa membayar pajak itu baik atau jelek.
2. Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi minat wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
3. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan seseorang atau perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas.
4. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.
5. kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Perpajakan secara Umum

1. Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Widyaningsih (2011:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Resmi (2007:1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Diana dan Setiawati (2010:1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

2. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- 2) objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas (a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Pokok. (b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Widyaningsih (2011:3) yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

- b) Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

- c) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

- d) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan

tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

e) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu:

- a) Asas domosili Yakni Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b) Asas sumber yakni Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c) Asas kebangsaan yakni Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7-9) Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi sebagai berikut:

a) *Official assessment system*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, dan Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Widyaningsih (2011:17) yaitu:

- a) Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum, pajakpun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang ", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak di perlakukan secara umum. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

- c) Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d) Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:8-9) yaitu sebagai berikut:

- a) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b) Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Pajak Penghasilan Umum

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. subjek pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Mardiasmo (2011:155).

Menurut Mardiasmo (2011:155) Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. yang termasuk pajak penghasilan yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgnisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,

pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4 Ketetapan Hukum Dan Sanksi

Menurut Jatmiko (2006:19) sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat

dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut harus dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya dengan hukum pajak (Jamitko 2006:19).

Menurut Jamitko (2006:19) dalam penelitiannya yang menguraikan bahwa terdapat beberapa indikator wajib pajak akan dikenakan sanksi denda perpajakan, diantaranya adalah:

1. Lalai membayar dan melaporkan pajak akan dikenakan denda. Setiap wajib pajak yang lalai dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajak patut untuk dikenakan denda.
2. Keterlambatan membayar pajak akan mempengaruhi keuangan perpajakan dan kelanjutan usaha wajib pajak. Setiap wajib pajak jika terlambat membayar pajak maka akan mempengaruhi keuangan perpajakan dan kelanjutan usaha bagi wajib pajak.
3. Terlambat membayar pajak akan mempengaruhi kepercayaan rekan atau pihak lain. Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak telat pada waktunya maka akan mempengaruhi kepercayaan rekan atau pihak lain.

2.1.5 Kondisi Keuangan

Kasmir dan Jakfar (2007:111) menyatakan bahwa laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap Negara yaitu Pajak.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Jatipurbo 2011). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo 2011). Dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang. Kasmir dan Jakfar (2007:92). Jadi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya.

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman, dalam Jatipurbo 2011). Perusahaan mungkin akan berusaha mengatur penghasilan yang mereka capai guna meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Semakin tinggi penghasilan yang mereka maka akan mengeluarkan jumlah pajak yang besar pula.

2.1.6 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Teori perilaku perencanaan (theory of planned behaviour) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan. Niat menurut Theory of Reasoned Action (TRA), merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya suatu tindakan. Niat dipengaruhi oleh dua faktor dasar, yaitu faktor pribadi dan faktor pengaruh sosial. Kedua faktor tersebut berpengaruh positif terhadap niat perilaku individu yang secara positif menyebabkan perilaku. Perilaku merupakan tindakan aktual individu akibat dari faktor-faktor yang memengaruhinya (Ajzen, 1991). TRA hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang dikerjakan secara sukarela, bukan perilaku-perilaku yang diwajibkan yaitu perilaku yang tidak semuanya dibawah kontrol penuh individu.

Theory of planned behavior (TPB) ini dikembangkan oleh Icek Ajzen dengan menambahkan konstruk yang disebut kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) yaitu untuk mengatur perilaku kontrol individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk berperilaku.

Theory of planned behavior (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia dan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka (Ajzen, 2005:117).

1. Sikap (*Attitude*)

Menurut Jogiyanto (2007:36) "Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan". Sikap dapat pula diartikan merupakan suatu keadaan

internal yang memengaruhi pilihan tindakan individu terhadap objek, orang atau kejadian tertentu.

Berdasarkan teori ini, sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat melakukan suatu perilaku. Dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan *outcome* yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya.

2. Norma Subyektif (*Subjective Norm*)

Norma-norma subyektif (*subjective norms*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2008:42). Norma subyektif menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*), jika individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

Keyakinan normatif berkenaan dengan harapan-harapan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat. *Subjective Norms* didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk

menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun ringkasan penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Anggun Kurniawan Saraswati (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Variabel Independen: 1. Sikap 2. Niat 3. Kondisi Keuangan 4. Fasilitas Perpajakan 5. Iklim Organisasi Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan 2. Niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan 3. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan

					<p>secara signifikan</p> <p>4. Fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara tidak signifikan, dan</p> <p>5. Iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan.</p>
2.	Zulaikha Harjanti Puspa Arum (2012)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib Pajak 2. Pelayanan Kantor Pajak 3. Sanksi perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Analisis Berganda	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

					kepatuhan membayar pajak
3.	Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Perpajakan 2. Petugas Pajak 3. Hukum Pajak (Sanksi Perpajakan) 4. Sikap Rasional <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Analisis Berganda	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Petugas Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Hukum Pajak (Sanksi Perpajakan) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sikap Rasional Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Sri Hardaya (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Norma Subjektif 3. Kontrol Keprilakuan 4. Kondisi Keuangan 	Analisis Berganda	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak badan yang

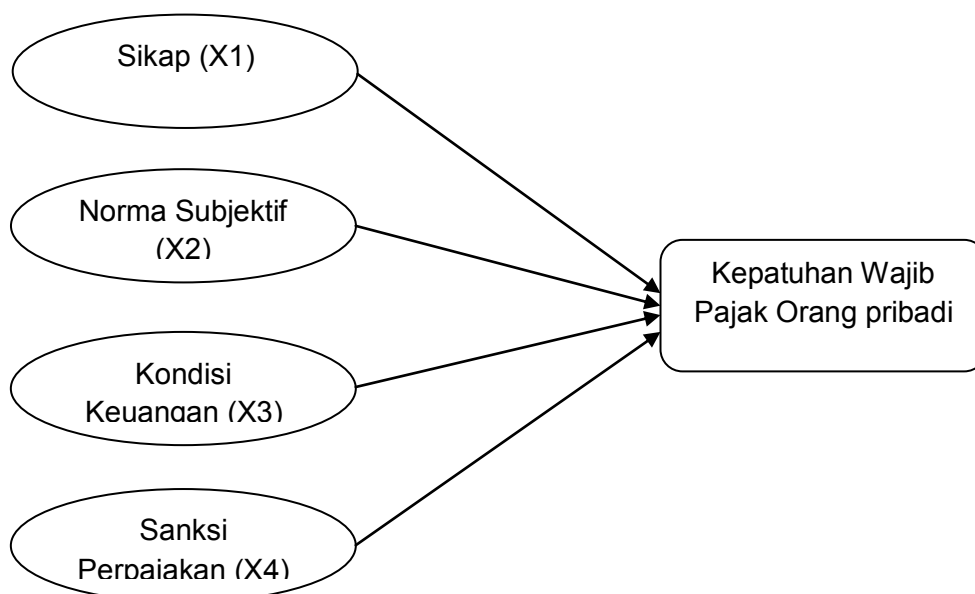
		Watampone	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak		<p>terdaftar di KPP Pratama Watampone.</p> <p>2.Norma Subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.</p> <p>3.Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan , berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Watampone.</p> <p>4.Kondisi keuangan, berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan</p>
--	--	-----------	---	--	--

					terhadap kepatuhan Wajib pajak. di KPP Pratama.
--	--	--	--	--	---

(Sumber : Data diolah 2015)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (*independen*) dan terikat (*dependen*). Variabel bebas yang digunakan yaitu Sikap, Norma subjektif, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Adapun gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jogiyanto (2007:36) “Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan”. Jika seorang wajib pajak memiliki sikap mendukung terhadap perilaku kepatuhan pajak maka cenderung berperilaku patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika seorang wajib pajak memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan pajak, maka cenderung untuk tidak melaksanakan atau tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Hardayana (2013) melakukan penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak badan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siat dan Toty (2013), dan Saraswati (2012).

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jogiyanto (2007:42) “Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan”. Jika orang-orang disekitar wajib pajak memiliki sikap

positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan menghindar atau lalai terhadap kewajiban pajaknya.

Hardayah (2013) melakukan penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak badan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kasmir dan Jakfar (2007:92) menyatakan bahwa Dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang. Jadi seorang wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Saraswati (2012) dalam penelitiannya yang menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) membuktikan bahwa Kondisi keuangan perusahaan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardayah (2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Jika wajib pajak menyadari bahwa ketika ia melanggar atau lalai terhadap kewajiban pajaknya maka ia akan diberi sanksi.

Sanksi pajakan merupakan salah satu faktor penentu seorang wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya sebagai mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siat dan Toty (2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatori* yakni penelitian menggabungkan beberapa variabel penelitian yang telah diuji sebelumnya. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan desain survei dengan memberikan kuesioner kepada responden. Unit analisis adalah individual, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kantor Pajak Pratama Makassar Selatan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen) dan terikat (dependen). Variabel bebas yang digunakan yaitu Sikap, Norma subjektif, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Perajakan. Sedangkan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan beralamatkan di Perintis Kemerdekaan KM 1 Kota Makassar. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama satu semester.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling yang digunakan adalah judgment sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan satu kriteria tertentu. Dalam hal kriteria tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang datang dan melaporkan pajak bulanan (masa) pada periode 24 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 dan yang mengembalikan kuesioner penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 117 Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang peneliti peroleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. Data dari jawaban responden dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengajukan daftar pernyataan yang telah disusun dalam bentuk angket kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Langkah yang dilakukan adalah menyebarkan kuesioner kepada responden kemudian responden diminta untuk memberikan penilaian atas pernyataan yang diajukan, dengan pilihan jawaban yang disediakan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Jika data telah terkumpul berupa data interval, kemudian

dilakukan pengelompokan data menjadi berbagai bagian pengamatan kemudian dilakukan analisis data.

3.6 Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen) dan terikat (dependen). Variabel bebas yang digunakan yaitu Sikap, Norma subjektif, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Perajakan. Sedangkan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Sikap Wajib Pajak

Menurut Jogiyanto (2007:36) “Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan”.

Sikap dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Hardayana (2013) yaitu Keinginan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, Pemanfaatan pajak yang transparan, Biaya suap ke fiskus lebih besar dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat, diuntungkan oleh sistem pajak. Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.

2. Norma Subjektif

Menurut Jogiyanto (2007:42) “Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan”.

Norma Subjektif dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Hardayana (2013) yaitu Pengaruh teman, Pengaruh pemilik usaha lainnya, Pengaruh Petugas Pajak dan Pengaruh Konsultan Pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Ordinal dengan teknik pengukuran skala likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.

3. Kondisi Keuangan

Kasmir dan Jakfar (2007:92) menyatakan bahwa Dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang.

Kondisi Keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator Hardayana (2013) yaitu: pengaruh keuntungan perusahaan, pengaruh kerugian perusahaan, Kondisi arus kas tahun terakhir yang baik dan Kondisi kas tahun terakhir yang kurang baik. Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:78).

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang direplikasi dari indikator Arum (2012) yaitu sanksi pajak yang berat, sanksi pajak diterapkan secara konsisten, dan pernah dijatuhi sanksi pajak. Pengukuran variabel sanksi pajak diukur menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert 5 poin untuk 3 pertanyaan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang direplikasi dari indikator Arum (2012) yaitu paham dan berusaha memahami Undang – Undang, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert 5 poin untuk 4 pertanyaan.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak (*software*) SPSS 21.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang demografi responden penelitian dan gambaran tentang variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata (mean), kisaran aktual, penyimpangan baku (standard deviation), dan kecenderungan jawaban responden.

3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dan mengidentifikasi suatu variabel. Uji validitas mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner yang digunakan betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2006:45). Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Pearson's Correlation product Moment*, dengan cara mengkoreksi antara skor masing-masing item pernyataan dengan skor item pernyataan tersebut. Instrumen dinyatakan valid jika nilai probabilitas $<0,05$ ($\alpha=5\%$).

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2006:42).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi pada model penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji keaslian nilai parameter yang dikalikan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a) Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Jika terdapat normalitas, residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai menas sama dengan nol. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik one sample Kolmogorov-smirnov test. Pengambilan

keputusan dilakukan dengan membandingkan p value yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas dengan tingkat signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika p value $> \alpha$ 0,05, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2006:89).

b) Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006:91). Multikolinieritas antar variabel independen dapat dilihat dari nilai *variances inflation factor* (VIF). Ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel variabel independen yang lain. Nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006:92).

c) Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain (Ghozali, 2006:105). Jika variance satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya

SPRESID. Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual) dan Uji F (Uji Signifikansi Parameter Parsial). Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
2. $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial (bersama-sama) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nugroho (2011:99) menyatakan bahwa untuk mengetahui

bersama-sama apakah secara simultan variabel bebas X memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen Y, maka dapat dilakukan uji signifikansi dengan hipotesis:

Adapun statistik pengujiannya menurut Nugroho (2010:100) yaitu:

- a. Jika $-F_{tabel} \geq t_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $-F_{tabel} > F_{hitung}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Adapun persamaan model estimasi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel Sikap

β_2 : Koefisien regresi variabel Norma Subjektif

β_3 : Koefisien regresi variabel Kondisi keuangan

β_4 : Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak

X1 : Sikap

X2 : Norma Subjektif

X3 : Kondisi Keuangan

X4 : Sanksi Pajak

E : *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Instansi Tempat Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara 1 Jalan Urip Sumohardjo KM 4 Makassar. Sebagai salahsatu implementasi penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, Kantor Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan bertanggung jawab pengadministrasian seluruh jenis pajak Rappocini, Makassar, Panakukang, dan Manggala.

Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pejabat Sementara Kepala Kantor, 10 Pejabat Sementara Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana. Selanjutnya dengan diterbitkannya sejumlah surat keputusan mutasi pegawai sampai dengan saat ini,

jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah 89 orang, yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 10 Kepala Seksi, 13 Account Representative, 2 Operator Console, 3 Juru Sita, 11 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 1 Bendahara, 47 Pelaksana.

1. Uraian Tugas

Uraian tugas pokok pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor memiliki tugas yaitu melaksanakan kewenangan dibidang perpajakan dan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum memiliki tugas yaitu melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, pelayanan, pengolahan data dan informasi perpajakan pengawasan, dan pemeriksaan serta penagihan pajak.

a) Kepala Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas urusan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

b) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas urusan pencarian, pengurusan serta pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan,

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan laporan kinerja.

c) Kepala Seksi Pelayanan

Memiliki tugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak serta pelaksanaan kerjasama perpajakan.

d) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi pajak serta melakukan evaluasi hasil banding.

e) Kepala Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak, pengawasan pelaksanaan peraturan perpajakan, aturan pemeriksaan pajak, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f) Kepala Seksi Penagihan

Memiliki tugas untuk urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif serta usulan penghapusan piutang.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi, Misi, dan Nilai

Visi, misi dan nilai dari Kantor Palayan Pajak Pratama Selatan Kota Makassar yaitu :

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Nilai

1) Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

2) Profesionalisme

Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.

3) Inovasi

Memiliki pikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan mempertahankan aturan dan norma yang berlaku.

4) Teamwork

Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk memnunjng tugas dan pekerjaan.

KPP Pratama Makassar Selatan mengadakan kegiatan yang disebut ekstensifikasi wajib pajak (WP), sehingga jumlah wajib pajaknya dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis wajib pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun sebagai pemotongan atau pemungut pajak (seperti bendaharawan Instansi Pemerintah).

Jenis pajak yang yang dikelola di KPP Pratama Makassar Selatan, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pejualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya.

Berdasarkan kegiatan di atas, karakteristik KPP Pratama Makassar Selatan yaitu :

1. Merupakan penggabungan dari tiga unit kantor pajak sebelumnya, yaitu KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan Penyidikan Pajak. Sasaran dari pembentukan dan penggabungan pengoperasian kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak dengan administrasi modern antara lain :
 - a. Maksimisasi penerimaan pajak.
 - b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
 - c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi.
 - d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak.
 - e. Karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional.
 - f. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
 - g. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dari DJP.
2. Struktur organisasi umumnya sama dengan KPP WP besar dan KPP Madya, hanya saja dengan penambahan satu seksi yaitu seksi ekstensifikasi perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan gabungan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak yang dikelola direktorat jenderal pajak (PPH, PPN, PPnBm, bea materai, PBB dan BPHTB).
5. Account Representative (AR) ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu atau wajib pajak (WP) tertentu yang berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan.

4.2. Deskripsi Data

Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden, dimana responden memberikan pernyataan dan penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung persentasenya.

4.2.1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 117 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang diambil dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling yang digunakan adalah judgment sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan satu kriteria tertentu. Dalam hal kriteria tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang datang dan melaporkan pajak bulanan (masa) pada periode 24 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 dan yang mengembalikan kuesioner penelitian.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang didistribusikan	117	100%
2.	Kuesioner yang cacat/tidak lengkap	-	- %
3.	Kuesioner yang dikembalikan dan diolah	117	100%

Sumber: hasil olah data 2015

Distribusi kuesioner pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden telah dikembalikan dengan lengkap dan layak untuk diolah dan dianalisis.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Laki-laki	73	62,4%
2.	Perempuan	44	37,6%
3.	Tidak mengisi	0	0,0%
	Jumlah	117	100%

Sumber : hasil olah data 2015

Demografi responden untuk jenis kelamin pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada jumlah responden perempuan. Jumlah laki-laki yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 73 orang atau 62,4%, sedangkan responden perempuan sebanyak 44 orang atau 38,6%.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	SMA/SMK	29	24,8%
2.	Diploma	13	11,1%
3.	Sarjana	75	64,1%
4.	Pascasarjana	0	0,0%
5.	Tidak mengisi	0	0,0%
	Jumlah	117	100%

Sumber: hasil olah data 2015

Demografi responden berdasarkan latar belakang pendidikan pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 29 orang atau 24,8%; Diploma sebanyak 13 orang atau sebesar 11,1%; dan sarjana sebanyak 75 orang atau sebesar 64,1%.

Tabel 4.4 Umur Responden

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	21-30 tahun	46	39,3%
2.	31-40 tahun	55	37,6%
3.	41-50 tahun	18	15,4%
4.	51-60 tahun	6	5,1%
5.	Tidak mengisi	3	2,6%
	Jumlah	117	100%

Sumber: hasil olah data 2015

Demografi responden berdasarkan umur pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden berumur 21-30 tahun sebanyak 46 orang atau 39,3%; responden berumur 31-40 tahun sebanyak 44 orang atau 37,6%; responden berumur 41-50 tahun sebanyak 18 orang atau 15,4%; responden berumur 51-60 tahun sebanyak 6 orang atau 5,1%; sedangkan responden yang tidak menjawab adalah sebanyak 3 orang atau 2,6%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merupakan responden yang berada pada usia produktif.

4.2.2. Deskripsi Jawaban Responden

Pada deskripsi jawaban responden akan dijelaskan jawaban responden mengenai sikap, norma subjektif, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Deskripsi jawaban responden dilakukan dengan menghitung nilai rata-

rata (*mean*) jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan dan secara keseluruhan. Untuk mengategorikan rata-rata jawaban responden digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$IK = \frac{STt - STr}{JK}$$

Dimana : IK = interval kelas
 STt = skor tertinggi yaitu 5
 STr = skor terendah yaitu 1
 JK = jumlah kelas

Sehingga berdasarkan rumus di atas menjadi:

$$IK = \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$IK = 0,80$$

Dengan diketahui interval kelas yaitu 0,80 kemudian disusun kriteria penilaian rata – rata jawaban responden pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5 Interval Kelas

Interval	Penilaian untuk setiap variabel
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Cukup tinggi
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat tinggi

Sumber: Diolah peneliti (2015)

1. Sikap

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel sikap adalah sebesar 3,60 dengan kategori tinggi berarti bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KKP Pratama Makassar Selatan telah bersikap baik atau patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata tertinggi adalah nilai rata-rata pada item X1.4 yaitu sebesar 3,65 dan nilai rata-rata terendah adalah nilai rata-rata pada item X1.1 yaitu sebesar 3,55.

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Sikap

Item pernyataan	Skor					Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5		
X1.1	4	11	43	34	25	3.55	Tinggi
X1.2	2	12	36	43	24	3.64	Tinggi
X1.3	1	16	39	37	24	3.57	Tinggi

X1.4	2	14	28	51	22	3.65	Tinggi
Rata-rata						3.60	Tinggi

Sumber: Data diolah (2015)

2. Norma Subjektif

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Norma Subjektif

Item pernyataan	Skor					Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5		
X2.1	8	17	24	36	32	3.57	Tinggi
X2.2	0	17	26	39	35	3.78	Tinggi
X2.3	8	17	24	36	32	3.57	Tinggi
X2.4	6	18	28	37	28	3.53	Tinggi
Rata-rata						3.61	Tinggi

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel norma subjektif adalah sebesar 3,61 dengan kategori tinggi yang berarti bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KKP Pratama Makassar Selatan telah memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata tertinggi adalah nilai rata-rata

pada item X2.2 yaitu sebesar 3,78 dan nilai rata-rata terendah adalah nilai rata-rata pada item X2.4 yaitu sebesar 3,53.

3. Kondisi Keuangan

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kondisi Keuangan

Item pernyataan	Skor					Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5		
X3.1	12	15	23	47	20	3.41	Tinggi
X3.2	12	18	41	26	20	3.20	Cukup
X3.3	6	15	30	44	22	3.52	Tinggi
X3.4	5	19	35	33	25	3.46	Tinggi
Rata-rata						3.39	cukup

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4.8 nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel kondisi keuangan adalah sebesar 3,39 dengan kategori cukup tinggi yang artinya bahwa orang pribadi yang terdaftar pada KKP Pratama Makassar Selatan memiliki kondisi keuangan yang baik atau mampu membayar pajak. Nilai rata-rata tertinggi adalah nilai rata-rata pada item X3.3 yaitu sebesar 3,52 dan nilai rata-rata terendah adalah nilai rata-rata pada item X3.2 yaitu sebesar 3,20.

4. Sanksi Pajak

Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Item pernyataan	Skor					Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5		
X4.1	4	15	25	35	38	3.75	Tinggi
X4.2	0	14	29	39	35	3.81	Tinggi
X4.3	7	18	23	37	32	3.58	Tinggi
Rata-rata						3.71	Tinggi

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel sanksi pajak adalah sebesar 3,71 dengan kategori tinggi yang berarti bahwa orang pribadi yang terdaftar pada KKP Pratama Makassar Selatan menyadari sanksi perpajakan. Nilai rata-rata tertinggi adalah nilai rata-rata pada item X4.2 yaitu sebesar 3,81 dan nilai rata-rata terendah adalah nilai rata-rata pada item X4.3 yaitu sebesar 3,58.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Kepatuhan wajib Pajak

Item pernyataan	Skor					Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5		
Y1.1	6	18	28	37	28	3.53	Tinggi
Y1.2	12	15	23	47	20	2.89	Cukup
Y1.3	8	16	34	34	25	3.44	Tinggi
Y1.4	3	14	34	42	24	3.59	Tinggi
Rata-rata						3.36	Tinggi

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,36 dengan kategori tinggi yang artinya bahwa orang pribadi yang terdaftar pada KKP Pratama Makassar Selatan telah bersikap baik atau patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata tertinggi adalah nilai rata-rata pada item Y1.4 yaitu sebesar 3,59 dan nilai rata-rata terendah adalah nilai rata-rata pada item Y1.2 yaitu sebesar 2,89.

4.2.3. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *corrected item total correlation*. Apabila nilai *corrected item total correlation* lebih dari 0,24 maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas pada variabel

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, kesukarelaan, *computer self-efficacy*, dan penggunaan sistem *e-filing* adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Uji Validitas Variabel Sikap

No	Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1	X1.1	0.783	Valid
2	X1.2	0.816	Valid
3	X1.3	0.829	Valid
4	X1.4	0.717	Valid

Sumber: Data diolah (Lampiran 3)

Variabel Sikap diukur melalui 4 (empat) item pernyataan, dan hasil uji validitas pada item pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semuanya dinyatakan valid, dikarenakan nilai *corrected item total correlation* yang dihasilkan lebih dari 0,24.

Tabel 4.12 Uji Validitas Variabel Norma Subjektif

No	Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1	X2.1	0.923	Valid
2	X2.2	0.749	Valid
3	X2.3	0.923	Valid
4	X2.4	0.598	Valid

Sumber: Data diolah (Lampiran 4)

Variabel norma subjektif diukur melalui 4 (empat) item pernyataan, dan hasil uji validitas pada item pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semuanya dinyatakan valid, dikarenakan nilai *corrected item total correlation* yang dihasilkan lebih dari 0,24.

Tabel 4.13 Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan

No	Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1	X3.1	0.792	Valid
2	X3.2	0.751	Valid
3	X3.3	0.843	Valid
4	X3.4	0.845	Valid

Sumber: Data diolah (Lampiran 5)

Variabel kondisi keuangan diukur melalui 4 (empat) item pernyataan, dan hasil uji validitas pada item pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semuanya dinyatakan valid, dikarenakan nilai *corrected item total correlation* yang dihasilkan lebih dari 0,24.

Tabel 4.14 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

No	Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1	X4.1	0.8887	Valid
2	X4.2	0.845	Valid
3	X4.3	0.837	Valid

Sumber: Data diolah (Lampiran 6)

Variabel persepsi kegunaan diukur melalui 3 (tiga) item pernyataan, dan hasil uji validitas pada item pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semuanya dinyatakan valid, dikarenakan nilai *corrected item total correlation* yang dihasilkan lebih dari 0,24.

Tabel 4.15 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1	Y1.1	0.813	Valid
2	Y1.2	0.809	Valid
3	Y1.3	0.806	Valid
4	Y1.4	0.566	Valid

Sumber: Data diolah (Lampiran 7)

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui 4 (empat) item pernyataan, dan hasil uji validitas pada item pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semuanya dinyatakan valid, dikarenakan nilai *corrected item total correlation* yang dihasilkan lebih dari 0,24.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *cronbach's alpha*. Apabila nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 maka item pernyataan tersebut dinyatakan reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas pada variabel sikap, norma subjektif, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Sikap	0,794	Reliabel
2	Norma Subjektif	0,814	Reliabel
3	Kondisi Keuangan	0,820	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,830	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,746	Reliabel

Sumber: Data diolah (Lampiran 3-7)

4.1 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk mendapatkan bukti empirik sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Data diperoleh dari hasil kuesioner, kemudian dikuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistik.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS 21.0 yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum model regresi, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieirtas. Adapun hasil uji asumsi klasik pada model regresi ini adalah sebagai berikut.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *one sample Kolmogorov-smirnov test*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan *p value* yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas dengan tingkat signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika *p value* > α 0,05.

Gambar 4.17

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98260737
	Absolute	,066
Most Extreme Differences	Positive	,057
	Negative	-,066
Kolmogorov-Smirnov Z		,711
Asymp. Sig. (2-tailed)		,693

a. Test distribution is Normal.

(Sumber: Aoutput SPSS 21.0, 2015)

Hasil pengujian *one sample kolmogorf-smirnov test* seperti terlihat pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0,693. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Pembuktian ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara menghitung VIF (*Variance inflation Factor*), jika VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, namun jika lebih kecil dari 10 tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.18 Coefficients (a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,966	,752		2,613	,010		
1 X1	,270	,124	,245	2,174	,032	,167	5,987
X2	,731	,113	,792	6,447	,000	,141	7,114
X3	,402	,074	,436	5,413	,000	,327	3,056
X4	-,712	,156	-,615	-4,574	,000	,117	8,521

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Aoutput SPSS 21.0, 2015)

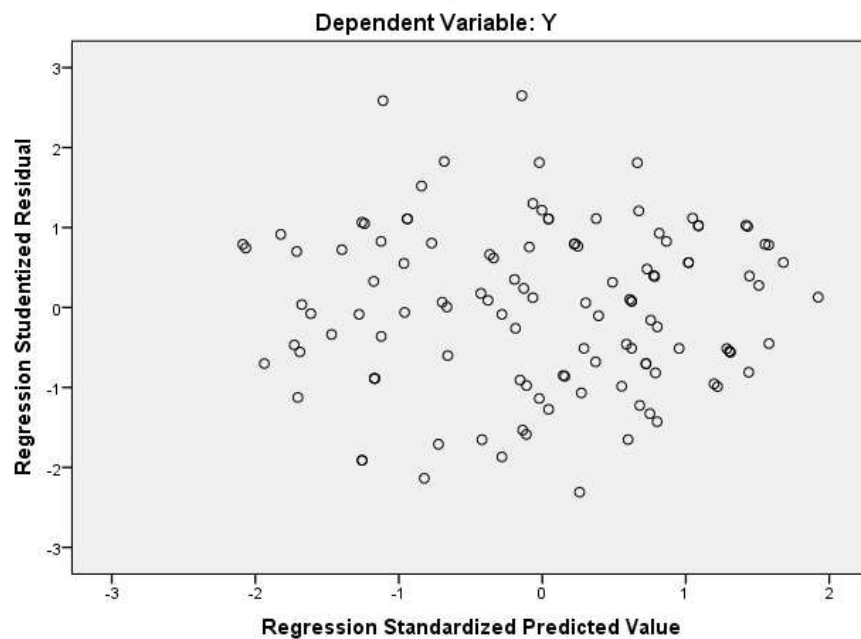
Berdasarkan Tabel 4.18 dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai VIF pada variabel Sikap (X_1), Norma Subjektif (X_2), Kondisi Keuangan (X_3), dan Sanksi Pajak (X_4) kurang dari 10 ($VIF < 10$).

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode chart (diagram Scatterplot). Dengan asumsi bahwa:

- a) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- b) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
Scatterplot Dependent Variabel Y



(Sumber: Aoutput SPSS 21.0, 2015)

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk satu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

4.1.2 Analisis Regresi Berganda

Dari hasil analisis dengan bantuan program SPSS 21.0, maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = 1,966 + 0,270X_1 + 0,731X_2 + 0,402X_3 - 0,712X_4$$

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.19 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,966	,752		2,613	,010		
1 X1	,270	,124	,245	2,174	,032	,167	5,987
X2	,731	,113	,792	6,447	,000	,141	7,114
X3	,402	,074	,436	5,413	,000	,327	3,056
X4	-,712	,156	-,615	-4,574	,000	,117	8,521

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Data diolah (Lampiran 9))

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β_0) adalah sebesar 1,966, hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Sikap (X1), Norma Subjektif (X2), Kondisi Keuangan (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4), maka kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,966. Sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien regresi untuk β_1 sebesar 0,270. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel sikap (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). hal ini menunjukkan bahwa ketika Sikap meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,270 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk β_2 sebesar 0,731. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel norma subjektif (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). sehingga jika norma subjektif yang terjadi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,731 satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk β_3 sebesar 0,402. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa variabel kondisi keuangan (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). hal ini menunjukkan bahwa ketika Kondisi Keuangan meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat sebesar 0,402 satuan.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk β_4 sebesar - 0,712. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak (X4) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). hal ini menunjukkan bahwa ketika sanksi

perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan menurun sebesar - 0,712 satuan.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel Sikap, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,873 ^a	,763	,754	1,710

(Sumber: Data diolah (Lampiran 9))

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R square yang diperoleh sebesar 0,763 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dipengaruhi oleh variabel Sikap Wajib pajak, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak sebesar 76,3% dan sisanya 23,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti jenis badan usaha, fasilitas, lingkungan usaha dan lain-lain.

Pengujian Simultan ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Sikap Wajib Pajak, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orag Pribadi secara serempak.

Tabel 4.21 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1053,308	4	263,327	90,004	,000 ^b
Residual	327,683	112	2,926		
Total	1380,991	116			

(Sumber: Data diolah (Lampiran 9))

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05, maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan sanksi pajak secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan F = 0,000 < 0,05. Sehingga jika Sikap Wajib Pajak, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan dan Kondisi Keuangan secara bersama-sama meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak badan juga akan meningkat.

4.3. Pembahasan

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Sikap sebagai variabel X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung sebesar 2,174 dengan nilai signifikansi sebesar 0.32 yang berada dibawah 0,05. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,270.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu semakin tinggi sikap wajib pajak memahami peraturan pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardayana (2013), Siat dan Toty (2013), dan Saraswati (2012) yang menemukan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial antara pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,447 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,731.

Hal ini menunjukkan bahwa Norma Subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana ketika Norma Subjektif berpengaruh baik terhadap Wajib Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardayana (2013) yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

3. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Kondisi Keuangan sebagai variabel X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung sebesar 5,413 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berada dibawah 0,05. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,402.

Hal ini menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana ketika Kondisi Keuangan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Saraswati (2012), dan Hardayana (2013) yang membuktikan bahwa Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara sanksi pajak sebagai variabel X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan t hitung sebesar -4,574 dengan nilai signifikansi sebesar 0.00 yang berada dibawah 0,05. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,712.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dimana ketika sanksi pajak meningkat maka akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), serta penelitian Siat dan Toty (2013) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Norma Subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
4. Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
5. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa variabel Sikap, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, adapun saran-saran yang diajukan oleh peneliti, adalah:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial dan simultan berpengaruh secara signifikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat memperhatikan dan memahami Sikap, Norma Subjektif, Kondisi Keuangan, dan sanksi pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya fokus pada empat variabel yaitu Sikap, Norma Subjektif, Kondisi keuangan, dan sanksi pajak, untuk Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel lain seperti jenis badan usaha, fasilitas, lingkungan usaha dan lain-lain dan dapat mencoba pada kantor pajak yang berbeda.

1.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini dan dianggap perlu untuk diungkapkan agar tidak memberikan interpretasi yang menyesatkan bagi pembacanya. Keterbatasan-keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Daftar wajib pajak orang pribadi sebaiknya diketahui dengan lengkap, sehingga pada saat pembagian (pendistribusian) kuesioner peneliti dapat menggunakan sampel bersifat acak (*random*) karena kuesioner penelitian ini hanya didistribusikan langsung kepada responden atau wajib pajak yang datang melaporkan pajak bulanan hanya pada periode 24 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015.
2. Waktu pengumpulan data atau pembagian kuesioner dianggap kurang tepat karena waktu pembagian kuesioner bukan pada awal bulan atau periode pelaporan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, Kurnia Saraswati. 2012. *"Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Dikantor Pelayanan Pajak Pajak Surakarta)"*. Semarang : Universitas Diponegoro Surakarta.
- Anonime. 2005. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Christian, Cahyaputra & Agus, Arianto Toly. 2013. *"Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya"*. Jurnal. Universitas Kristen Petra.
- Diana, Anastasia, Setiawati, Lilis. 2009. *"Perpajakan Indonesia"*. Yogyakarta : Andi.
- Ghozali, Imam. 2006. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Hardayana, Sri. 2013. *"Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone"*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Jatipurbo, Aristanti. 2011. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur"*. Skripsi. Semarang: Fakultas ekonomi Universitas Diponegoro.
- Jatmiko Nugroho, Agus. 2006. *"Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)"*. Semarang : Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Jogiyanto. 2007. *"Sistem Informasi Keprilakuan"*. Yogyakarta : Andi.
- Kasmir dan Jakfar. 2007. *"Studi Kelayakan Bisnis"*. Jakarta : Kencana.
- Mardiasmo, 2011. *"Perpajakan Edisi Revisi 2011"*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Puspa Arum, Harjanti, Zulaikha. 2012. *" Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)"*. Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *"Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal"*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2007. *"Perpajakan Teori dan Kasus"*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2012.
Jakarta: Departemen keuangan republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Perpajakan.

Widyaningsih, Aristanti. 2011. *"Hukum Pajak dan Perpajakan"*. Bandung : Alfabeta.

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian



KUESIONER PENELITIAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

Diajukan oleh:

**Rafel Jaflaun
1110321033**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2015**



Universitas Fajar Program Studi S1 Akuntansi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden
di-

Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini saya sampaikan bahwa saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Fajar yang sedang melakukan penelitian mengenai “**Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk ikut berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini. Bapak/Ibu/Saudara (i) bebas memilih jawaban yang sesuai dengan persepsi anda. Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban **benar atau salah**. Jawaban yang terbaik adalah jawaban yang paling sesuai dengan persepsi yang anda miliki tentang pernyataan yang diajukan. Semua data/informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Harapan kami, Bapak/Ibu/Saudara (i) dapat mengisi kuesioner penelitian ini pada kesempatan pertama setelah kuesioner ini diterima. Namun jika tidak memungkinkan, batas waktu pengisian/pengembalian paling lambat 1 minggu setelah diterimanya kuesioner ini.

Demikian, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara (i) mengisi Kuesioner penelitian ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga bantuan Bapak/Ibu/Saudara (i) mendapat pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 4 April 2015

Rafel Jaflaun

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak diisi) : _____
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SMA Diploma Sarjana
Pascasarjana
4. Latar Belakang Pendidikan Formal (bidang ilmu/jurusan) : _____
5. Umur : _____ Tahun
6. Sejak Kapan Anda Terdaftar sebagai Wajib Pajak ? Tahun _____

B. PETUNJUK PENGISIAN

PETUNJUK PENGISIAN
<ul style="list-style-type: none">❖ Pernyataan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya serta diisi dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara (i) yang sebenarnya.❖ Mohon dipilih dan beri tanda X pada kolom yang Bapak/Ibu anggap paling tepat mencerminkan persepsi Bapak/Ibu. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk jawaban Bapak/Ibu/Saudara (i).❖ Adapun pilihan dari jawaban atas pertanyaan yang ada adalah sebagai berikut. <p>1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 2 untuk jawaban Tidak Setuju 3 untuk jawaban Netral 4 untuk jawaban Setuju 5 untuk jawaban Sangat Setuju</p>

C. KUESIONER PENELITIAN

Variabel Sikap

Mohon identifikasi apakah Anda SANGAT TIDAK SETUJU sampai dengan SANGAT SETUJU atas item-item pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda X		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral/ Tidak Tahu	Setuju	Sangat Setuju
1.	Bapak/Ibu mempunyai keinginan membayar pajak sesuai dengan seharusnya.					
2.	Bapak/Ibu selalu merasa pemanfaatan pajak yang transparan.					
3.	Bapak/Ibu merasa bahwa biaya suap kefiskus lebih besar dibandingkan pajak yang bisa dihemat.					
4.	Bapak/Ibu merasa diuntungkan oleh sistem pajak oleh KPP Pratama Makassar Selatan.					

Variabel Norma Subjektif

Mohon identifikasi apakah Anda SANGAT TIDAK SETUJU sampai dengan SANGAT SETUJU atas item-item pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda X		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral/ Tidak Tahu	Setuju	Sangat Setuju
5.	Teman Berpengaruh dalam membayar pajak.					

6.	Atasan atau pemilik saham berpengaruh dalam membayar pajak.					
7.	Petugas pajak berpengaruh dalam membayar pajak.					
8.	Konsultan pajak berpengaruh dalam membayar pajak.					

Variabel Kondisi Keuangan

Mohon identifikasi apakah Anda SANGAT TIDAK SETUJU sampai dengan SANGAT SETUJU atas item-item pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda X		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral/ Tidak Tahu	Setuju	Sangat Setuju
9.	Keuntungan yang dialami usaha, mempengaruhi Bapak/Ibu dalam membayar pajak.					
10.	Kerugian yang dialami usaha, mempengaruhi Bapak/Ibu dalam membayar pajak.					
11.	Kondisi kas terakhir yang membaik, mempengaruhi Bapak/Ibu dalam membayar pajak.					
12.	Kondisi kas terakhir yang					

	kurang baik, mempengaruhi Bapak/Ibu dalam membayar pajak.					
--	---	--	--	--	--	--

Variabel Sanksi Pajak

Mohon identifikasi apakah Anda SANGAT TIDAK SETUJU sampai dengan SANGAT SETUJU atas item-item pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda X		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral/ Tidak Tahu	Setuju	Sangat Setuju
13.	Bapak/Ibu percaya bahwa sanksi pidana bagi Wajib Pajak itu sangat berat dan membebani wajib pajak.					
14.	Bapak/Ibu percaya bahwa sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak patuh akan diterapkan secara konsisten dan tegas oleh Dirjen Pajak.					
15.	Bapak/Ibu pernah mendapat sanksi pajak.					

Kepatuhan Wajib Pajak

Mohon identifikasi apakah Anda SANGAT TIDAK SETUJU sampai dengan SANGAT SETUJU atas item-item pernyataan dibawah ini	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral/ Tidak Tahu	Setuju	Sangat Setuju
--	---------------------	--------------	--------------------	--------	---------------

dengan memberikan tanda X						
16.	Bapak/Ibu Pahami dan berusaha memahami undang-undang perpajakan..					
17.	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					
18.	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jmlah yang benar.					
19.	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					

Saran atau komentar Bapak/Ibu/Saudara (i) mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara (i) mengisi kuesioner secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

IDENTITAS PENELITI

Nama : Rafel Jaflaun

Alamat : Jl. Sudiang

No. Hp : 085299647878

Lampiran 3 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Sikap

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
Pearson Correlation	1	,572**	,475**	,394**	,783**
X1.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,572**	1	,630**	,367**	,816**
X1.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,475**	,630**	1	,506**	,829**
X1.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,394**	,367**	,506**	1	,717**
X1.4 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,783**	,816**	,829**	,717**	1
X1 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
N	117	117	117	117	117

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,794	,794	4

Lampiran 4 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Norma Subjektif

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
Pearson Correlation	1	,594**	1,000**	,326**	,923**
X2.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,594**	1	,594**	,262**	,749**
X2.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,004	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	1,000**	,594**	1	,326**	,923**
X2.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,326**	,262**	,326**	1	,598**
X2.4 Sig. (2-tailed)	,000	,004	,000		,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,923**	,749**	,923**	,598**	1
X2 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
N	117	117	117	117	117

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,814	,811	4

Lampiran 5 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Kondisi Keuangan

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3
Pearson Correlation	1	,457**	,532**	,549**	,792**
X3.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,457**	1	,482**	,465**	,751**
X3.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,532**	,482**	1	,740**	,843**
X3.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,549**	,465**	,740**	1	,845**
X3.4 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,792**	,751**	,843**	,845**	1
X3 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
N	117	117	117	117	117

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,820	,823	4

Lampiran 6 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Correlations

	X4.1	X4.2	X4.3	X4
Pearson Correlation	1	,675**	,623**	,887**
X4.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
N	117	117	117	117
Pearson Correlation	,675**	1	,584**	,845**
X4.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
N	117	117	117	117
Pearson Correlation	,623**	,584**	1	,837**
X4.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
N	117	117	117	117
Pearson Correlation	,887**	,845**	,837**	1
X4 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
N	117	117	117	117

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,830	,835	3

Lampiran 7 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y
Pearson Correlation	1	,600**	,551**	,262**	,813**
Y1.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,004	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,600**	1	,551**	,231*	,809**
Y1.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,012	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,551**	,551**	1	,294**	,806**
Y1.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,262**	,231*	,294**	1	,566**
Y1.4 Sig. (2-tailed)	,004	,012	,001		,000
N	117	117	117	117	117
Pearson Correlation	,813**	,809**	,806**	,566**	1
Y Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
N	117	117	117	117	117

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,746	,739	4

Lampiran 8 : Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98260737
	Absolute	,066
Most Extreme Differences	Positive	,057
	Negative	-,066
Kolmogorov-Smirnov Z		,711
Asymp. Sig. (2-tailed)		,693

a. Test distribution is Normal.

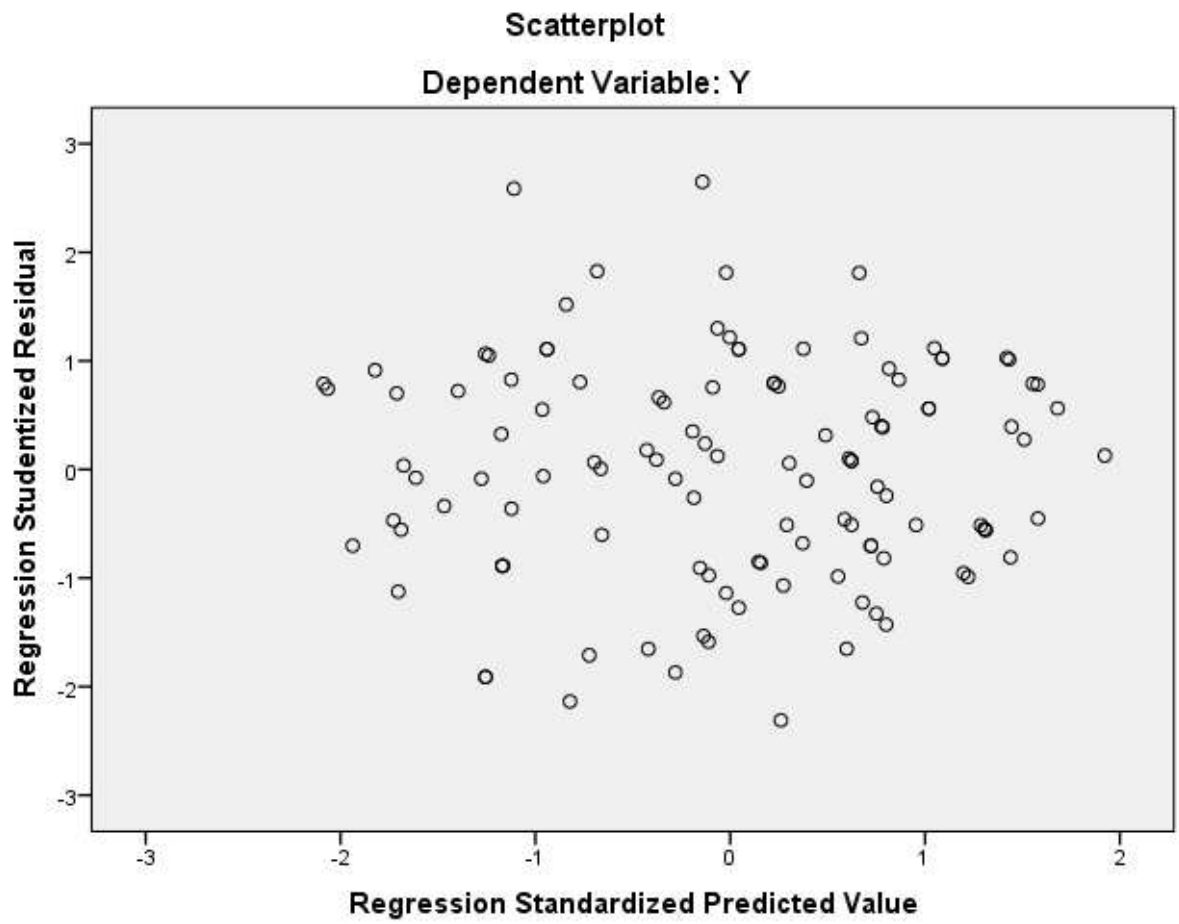
b. Calculated from data.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1,966	,752		2,613	,010		
	X1	,270	,124	,245	2,174	,032	,167	5,987
	X2	,731	,113	,792	6,447	,000	,141	7,114
	X3	,402	,074	,436	5,413	,000	,327	3,056
	X4	-,712	,156	-,615	-4,574	,000	,117	8,521

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 8 : Uji Asumsi Klasik (lanjutan)



Lampiran 9 : Analisis Regresi Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,873 ^a	,763	,754	1,710

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1053,308	4	263,327	90,004	,000 ^b
Residual	327,683	112	2,926		
Total	1380,991	116			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Lampiran 9 : Analisis Regresi Berganda (lanjutan)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,966	,752		2,613	,010		
1 X1	,270	,124	,245	2,174	,032	,167	5,987
X2	,731	,113	,792	6,447	,000	,141	7,114
X3	,402	,074	,436	5,413	,000	,327	3,056
X4	-,712	,156	-,615	-4,574	,000	,117	8,521

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X1	X2	X3	X4
1	1	4,906	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,046	10,384	,19	,00	,03	,16	,06
1	3	,036	11,600	,72	,00	,00	,24	,00
	4	,008	24,498	,07	,48	,42	,08	,03
	5	,004	36,516	,02	,51	,54	,53	,91

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7,70	19,79	13,99	3,013	117
Std. Predicted Value	-2,087	1,923	,000	1,000	117
Standard Error of Predicted Value	,177	,600	,342	,090	117
Adjusted Predicted Value	7,59	19,78	14,00	3,011	117
Residual	-3,775	4,438	,000	1,681	117
Std. Residual	-2,207	2,595	,000	,983	117
Stud. Residual	-2,310	2,649	-,001	1,005	117
Deleted Residual	-4,136	4,626	-,004	1,760	117
Stud. Deleted Residual	-2,357	2,724	-,001	1,013	117
Mahal. Distance	,255	13,272	3,966	2,590	117
Cook's Distance	,000	,102	,010	,015	117
Centered Leverage Value	,002	,114	,034	,022	117

a. Dependent Variable: Y